

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ade Irawan. et.al., *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch. 2014.
- Agus Riwanto. *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta :Thafa Media. 2016.
- Alatas, S.H. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta : LP3ES, 1987.
- Bagir Manan. *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 1996.
- Carlton Clymer Rodee, dkk. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- C.F. Strong. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Nusa Media: Bandung, 2015.
- Didik Supriyanto. et.al. *Dana Kampanye Pilkada Pengaturan Teknis Tentang dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta : Gramedia, 2009. DC : IFES. 2013
- Delly Mustafa. *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Gun Gun Heryanto. *Komunikasi Politik Sebuah Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Hendra Nurtjahyo. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance*. Stockholm ; Internastional IDEA, 2014. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1966.
- Janedjiri M. Gaffar. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2013.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

- Johani Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publishing. 2007.
- Joko Widodo. *Good Governance (Telaah dan Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Jon Piere dan B Guy Peters. *Governance Politics and The State*. New York : St Martin s Press. 2000.
- Magnus Ohman. *Controlling Money in Politics : An Introduction*. Washington
- Moh.Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2005.
- Munir Fuady. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama. 2010.
- Munir Fuady. *Teori-Teori (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- Office for Democratic Institutions and Human Rights, *Handbook for the Observation of Campaign Finance*. Warsaw : OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rights, 2016.
- P. Sondang Siagian. *Patologi Birokrasi: Analisis Administrasi dan Terapannya*.
- Peter Mahfud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2011.
- R Siti Zuhro. *Negara Parpol dan Korpri Studi Kasus Surabaya dalam Muridan Satriyo Wijoyo ed Politisasi Birokrasi Implikasi Kebijakan Monoloyalitas Pegawai PPW*. (LIPI: [s.1.], 1997)
- Ramlan Surbakti dkk. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Ramlan Surbakti. *Peta Permasalahan dalam Keuangan Politik Indonesia*. Jakarta :
- Refly Harun. *Pemilu Konstitusional*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Robert Klitgaard. *Membasmi Korupsi*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Mada Sukamulja dan Aditya Perdana (Ed.) , *Pembiayaan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Bawaslu RI. 2018.

- Magnus Ohman, *Controlling Money in Politics: An Introduction*, Washington DC: IFES, 2013.
- Magnus Ohman, Zainulbhai, dan Hani. *Regulating Political Finance*. Washington: The Global Experience, 2009.
- Soemitro, Roni Hanitjo. *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1998.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif ; Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press. 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 2014
- Teguh Prasetyo. *Pemilu Bermartabat: Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Sumbangan, Pengeluaran, dan Pelaporan Berdasarkan UU No. 1/2015 Juncto UU No. 8/2015*. Jakarta : Yayasan Perلودem, 2015.
- Teguh Prasetyo. *Pemilu Bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru Tentang Demokrasi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Veri Junaidi.et.al. *Anomali Keuangan Partai Politik :Pengaturan dan Praktek. :* Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Zainal Asikin dan Amirruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo. 2004

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum

C. Lain-lain

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, diadopsi oleh Dewan Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, oleh Dewan Umum PBB melalui Resolusi 2200A (XXI)

Agus Suryono. “Budaya Birokrasi Pelayanan Publik”. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (Maret 2001).

Thomas S. Kaihatu, 2006, “Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia”, Jurnal Manajemen Kewirausahaan, Vol. 8, No. 1.

Black Law Dictionary, <https://thelawdictionary.org/public/>, diakses pada Minggu, 7 Oktober 2018

, <https://thelawdictionary.org/disclosure/>, diakses pada Minggu, 7 Oktober 2018

Jimly Asshiddiqie, *Makalah Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, hlm. 4. Diakses di <http://www.jimly.com/> pada tanggal 22 April 2019, pukul 02.17 WIB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan> diakses pada Minggu, 7 Oktober 2018

Tersedia di <https://kumparan.com/@kumparannews/batas-sumbangan-dana-kampanye-di-pileg-dan-pilpres-naik-1535014619914172607>

Pengantar Dasar Partai Politik dan Demokrasi. Tersedia di <https://mediappr.wordpress.com/>

Tersedia di <https://news.detik.com/kolom/d-4128678/pelaporan-dana-kampanye-dan-potensi-korupsidiakses>

